

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

**Dina Intan Permata, Laily Qoriatul Fajrih, Intan Khumairoh, Crisanty Sutristyaningtyas Titik\***

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura  
220231100054@student.trunojoyo.ac.id; crisanty.titik@trunojoyo.ac.id\*

### ABSTRACT

*This research observation to identify the variables that may influence poverty in East Java in 2021. Poverty as the dependent variable, the independent variables are unemployment, average years of education, minimum wage, and GRDP. This study employs a quantitative methodology. The results of this study show that unemployment has no effect on poverty, average years of schooling has a significant negative effect on poverty, minimum wage has no effect on poverty, and GRDP has a significant positive effect on poverty.*

**Keywords:** *Poverty, Unemployment, Average Years of Schooling, Minimum Wage, GRDP*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021. Kemiskinan sebagai variabel dependen, variabel independennya adalah pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Pengangguran, Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, PDRB*

### PENDAHULUAN

Pembangunan mengacu pada perubahan yang meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan manusia dengan cara menaikkan standar hidup, harga diri, dan kebebasan individu. Pembangunan ekonomi adalah proses kompleks yang mencakup perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional. Proses ini juga melibatkan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan upaya untuk menghapus kemiskinan (Aprilia, 2016).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan memastikan kehidupan yang nyaman bagi semua orang. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai program pembangunan telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan lokal dan mewujudkan akar dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan secara tepat dan berkesinambungan menjadi prioritas, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dalam pembangunan nasional.

Seseorang yang memperoleh penghasilan yang rendah, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di lingkungan yang tidak sehat, dan mendapatkan kesehatan dan nutrisi

yang buruk disebut sebagai penduduk miskin (Todaro, 2011). Jika tingkat kemiskinan suatu negara rendah, itu menunjukkan tingkat kesejahteraan. Sebuah Negara yang memiliki tingkat kemiskinan rendah menunjukkan adanya kemakmuran. Faktanya, kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan masa depan.

Ketika seseorang atau kelompok masyarakat di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena alasan struktural, kultural, atau alam, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang relatif dan absolut. Pandangan ini menunjukkan seberapa luasnya dimensi kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang rumit dan beraneka segi, yang mendorong berbagai upaya pengetasan yang dilakukan secara menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan Masyarakat (Yanthi & Marhaeni, 2015). Seseorang yang mengalami kemiskinan terkadang tidak menyadari dirinya miskin.

Data kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 25.899 ribu jiwa yang menggambarkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan yang ada. Pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk memerangi kemiskinan, dengan dukungan kerjasama Masyarakat, sehingga mereka dapat menemukan penyebab utama kemiskinan dan berusaha mengambil manfaat dari yang dimiliki dalam menangani masalah kemiskinan, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah maupun provinsi dalam membantu pembangunan ekonomi, salah satu cara untuk mengakhiri kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Tujuan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai berkualitas tinggi (Lantik *et al.*, 2018)

Kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 4572,73 ribu jiwa. Dari 38 kota/kabupaten Jawa Timur di Jawa Timur kabupaten Malang menjadi urutan pertama jumlah kemiskinan sebesar 276.58 ribu jiwa dan yang menjadi urutan terakhir adalah kota Mojokerto dengan jumlah 8,37 ribu jiwa. Dilihat dari tabel dibawah variabel pemerintah provinsi Jawa Timur memprioritaskan penanggulangan penduduk miskin. Kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB.

**Tabel. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Jawa Timur 2021**

Kabupaten /Kota	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Kabupaten /Kota	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Kabupaten /Kota	Kemiskinan (Ribu Jiwa)
Malang	276.58	Kota Surabaya	152.49	Pacitan	84.19
Jember	257.09	Sidoarjo	137.15	Madiun	81.61
Sampang	237.23	Pamekasan	137.12	Tulungagung	78.59
Sumenep	224.73	Banyuwangi	130.93	Magetan	67.75
Probolinggo	223.32	Ngawi	130.81	Kota Malang	40.62
Bangkalan	215.97	Jombang	127.3	Kota Kediri	22.55
Tuban	192.58	Nganjuk	125.53	Kota Probolinggo	17.91
Kediri	184.49	Mojokerto	120.54	Kota Pasuruan	13.97
Lamongan	166.82	Bondowoso	115.18	Kota Blitar	11.33
Bojonegoro	166.52	Blitar	112.62	Kota Madiun	9.06
Gresik	166.35	Lumajang	105.25	Kota Batu	8.63
Pasuruan	159.78	Ponorogo	89.94	Kota Mojokerto	8.37
Kota Surabaya	152.49	Situbondo	86.95		
Sidoarjo	137.15	Trenggalek	84.89		

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan (persentase) kemiskinan, hal tersebut juga terjadi di provinsi Jawa Timur. Dari tabel dibawah tingkat pengangguran 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tertinggi berada pada

kabupaten sidoarjo dengan presentase 10.87 persen an Tingkat pengangguran terendah berada pada kabupaten Pacitan dengan presentase 2.04 persen infrastruktur yang memadai menjadi salah satu karakteristik daerah perkotaan menjadi tujuan Masyarakat sebagai tempat mencari nafkah, karena infrastruktur yang memadai cenderung menjadi pusat aktivitas perekonomian. Hal ini menjadi salah satu TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan TPT pedesaan. Penanggulanagn pemerintah terhadap kemiskinan yang belum merata menjadi salah satu penyebab TPT.

**Tabel. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur 2021 (Persen)**

Kabupaten /Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Kabupaten /Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Kabupaten /Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Sidoarjo	10.87	Pasuruan	6.03	Bondowoso	4.46
Kota Surabaya	9.68	Mojokerto	5.54	Ponorogo	4.38
Kota Malang	9.65	Jember	5.44	Ngawi	4.25
Kota Madiun	8.15	Banyuwangi	5.42	Magetan	3.86
Bangkalan	8.07	Malang	5.4	Situbondo	3.68
Gresik	8	Kediri	5.15	Blitar	3.66
Jombang	7.09	Madiun	4.99	Trenggalek	3.53
Kota Mojokerto	6.87	Nganjuk	4.98	Lumajang	3.51
Kota Blitar	6.61	Tulungagung	4.91	Sampang	3.45
Kota Batu	6.57	Lamongan	4.9	Pamekasan	3.1
Kota Probolinggo	6.55	Bojonegoro	4.82	Sumenep	2.31
Kota Kediri	6.37	Tuban	4.68	Pacitan	2.04
Kota Pasuruan	6.23	Probolinggo	4.55		

Menurut sebuah penelitian, lulusan perguruan tinggi memiliki rata-rata skor IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah., oleh karena itu, fleksibilitas lebih terbuka untuk mereka yang berpendidikan tinggi dalam hal pilihan karir dan jenis pekerjaan, mereka ini lebih fleksibel, ini dapat dipicu oleh ukuran upah atau tingkat upah, serta kenyamanan tempat kerja. Beberapa dari mereka bahkan akan lebih suka menganggur untuk sementara dari pada bekerja (Sirilius, 2015).

Provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi pada umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Di Jawa Timur, rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 mencapai 7,88 tahun, yang menunjukkan bahwa semakin lama seseorang mengenyam pendidikan formal, semakin banyak tahun standar yang mereka lalui dan semakin besar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Pada tahun 2021, hampir semua kabupaten di Jawa Timur mempunyai nilai rata-rata 6-7 tahun, dengan ini menunjukkan penduduk hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menyelesaikan wajib belajar sampai dengan SD/Sederajat. Meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu strategi penting dalam upaya solusi permasalahan kemiskinan.

Tingkat tertinggi rata-rata lama sekolah jika dilihat pada tabel dibawah menunjukkan bahwa dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur tertinggi berada pada kabupaten Madiun dengan 11.37 (tahun) dan tingkat terendah berada pada kabupaten Sampang dengan 4.86 tahun, dengan kondisi ini dapat dilihat jika semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Rata-rata lama sekolah juga menjadi penentu dalam pembagian upah pekerja. Antara tingkat sekolah yang tinggi dan rendah akan mendapatkan perbedaan upah yang dihasilkan, maka dari itu upah minimum dapat menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

**Tabel. 3 Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur 2021 (Persen)**

Kabupaten /Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Kabupaten /Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Kabupaten /Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kota Madiun	11.37	Magetan	8.36	Bojonegoro	7.38
Sidoarjo	10.72	Tulungagung	8.34	Ngawi	7.26
Kota Surabaya	10.5	Kediri	8.08	Tuban	7.18
Kota Mojokerto	10.47	Lamongan	8.04	Pamekasan	6.7
Kota Malang	10.41	Madiun	7.82	Lumajang	6.67
Kota Blitar	10.35	Nganjuk	7.78	Situbondo	6.62
Kota Kediri	10.15	Pacitan	7.61	Jember	6.49
Gresik	9.56	Trenggalek	7.56	Probolinggo	6.12
Kota Pasuruan	9.33	Ponorogo	7.55	Bangkalan	5.96
Kota Batu	9.31	Blitar	7.5	Bondowoso	5.94
Kota Probolinggo	8.95	Malang	7.43	Sumenep	5.92
Mojokerto	8.64	Banyuwangi	7.42	Sampang	4.86
Jombang	8.55	Pasuruan	7.41		

Upah minimum merupakan standar gaji terendah yang ditetapkan pengusaha dan industri untuk membayar pekerja di tempat atau perusahaan mereka. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk memenuhi standar minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Jika ada kenaikan upah minimum itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja namun tetap memerhatikan keberlangsungan investasi.

Dari tabel dibawah menunjukkan variasi yang perlu diperhatikan di beberapa kabupaten seperti, Ngawi, Sumenep, Lumajang, Tulungagung, Kediri, kota Kediri, Jember, Lamongan, Tuban, Jombang, kota Pasuruan, Malang, Pasuruan dan Gresik. Menunjukkan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan upah minimum dikota-kota untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi lokal.

**Tabel. 4 Upah Minimum Jawa Timur 2021 (Ribu)**

Kabupaten/Kota	upah minimum (Ribu)	Kabupaten/Kota	upah minimum (Ribu)	Kabupaten/Kota	upah minimum (Ribu)
Kota Batu	4.300.479	Kota Madiun	2.481.303	Situbondo	1.954.706
Bangkalan	4.297.031	Banyuwangi	2.355.663	Madiun	1.954.706
Mojokerto	4.293.582	Kota Pasuruan	2.350.000	Sampang	1.954.706
Sidoarjo	4.290.133	Bondowoso	2.314.279	Kota Kediri	1.954.706
Jombang	4.279.787	Kota Blitar	2.085.925	Kota Surabaya	1.954.706
Lumajang	3068275	Tuban	2.066.782	Magetan	1.951.588
Kota Probolinggo	2.970.503	Malang	2.033.505	Trenggalek	1.938.322
Kota Mojokerto	2.819.802	Blitar	2.010.000	Tulungagung	1.938.322
Nganjuk	2.654.096	Kediri	2.004.706	Probolinggo	1.938.322
Pasuruan	2.553.266	Kota Malang	2.004.706	Ngawi	1.938.322
Lamongan	2.532.235	Jember	1.982.295	Pamekasan	1.938.322
Gresik	2.488.725	Ponorogo	1.961.155	Sumenep	1.938.322
Kota Madiun	2.481.303	Bojonegoro	1.960.510	Pacitan	1.868.777

Dilihat dari tabel 4 data upah minimum di provinsi Jawa Timur 2021 dengan jumlah mencapai 2.819.801 rupiah, ada kenaikan Rp. 25.001,59 dibandingkan dengan tahun 2020 Rp 2.794.800. Upah minimum tertinggi berada dikota Batu dengan Rp 4.300.479 dan terendah berada di kabupaten Pacitan dengan Rp 1.868.777. Upah minium yang tinggi menjadi salah

satu faktor untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain itu PDRB juga memiliki keterkaitan terhadap kemiskinan. PDRB dapat berpengaruh terhadap kemiskinan dengan meningkatkan akses Masyarakat ke sumber daya ekonomi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterampilan Masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka.

Berdasarkan tabel yang ditunjukkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh sektor perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.454,50 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.669,12 triliun. PDRB tertinggi terdapat di Kota Surabaya dengan nilai 554.509,5 miliar, sedangkan PDRB terendah berada di Kota Mojokerto dengan nilai 6.588,1 miliar. tabel dibawah belum tentu dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan kemakmuran pada Masyarakat di jawa timur ataupun penyaluran pendapatan disetiap daerah ekonomi karena perubahan harga dalam pembentukan PDRB. Nilai ini dapat digunakan tanda bahwa Masyarakat mengalami peningkatan pendapatan.

**Tabel. 5 PDRB di Jawa Timur 2021 (Miliar)**

Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar)	Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar)	Kabupaten/Kota	PDRB (Miliar)
Kota Surabaya	554510	Jombang	39870.9	Sampang	19842.6
Sidoarjo	197241	Lamongan	39169.6	Madiun	19166.6
Pasuruan	145592	Tulungagung	38226	Magetan	18771.8
Gresik	134269	Blitar	36024	Trenggalek	18314.5
Kota Kediri	132406	Probolinggo	33721.1	Pamekasan	16793.9
Malang	102028	Sumenep	32750.2	Kota Batu	15916.8
Mojokerto	81940.9	Lumajang	32062	Pacitan	15785.2
Banyuwangi	81102.9	Nganjuk	26601.2	Kota Madiun	13519.9
Jember	76040	Bangkalan	23290	Kota Probolinggo	11074.5
Kota Malang	72163.2	Ponorogo	20513.4	Kota Pasuruan	8047.2
Bojonegoro	70258.5	Ngawi	20271	Kota Blitar	6708.1
Tuban	62323.1	Situbondo	20041.9	Kota Mojokerto	6588.1
Kediri	40626.8	Bondowoso	19935.6		

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2010), Kemiskinan tidak dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai taraf hidup minimum. Penentu kemiskinan sering kali bergantung pada tingkat konsumsi. Dari sudut pandang konsumsi, garis kemiskinan memiliki dua komponen utama. Pertama, biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti gizi yang minim dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, sejumlah kebutuhan beragam yang mencerminkan biaya yang diperlukan untuk ikut serta dalam kehidupan social Masyarakat sehari-hari.

Menurut Davis dan Martines (2015) Teori klasik berpendapat bahwa individu bertanggung jawab atas keadaan dan kemiskinan mereka sendiri. Perspektif ini menunjukkan bahwa individu membuat pilihan-pilihan yang membawa mereka pada kemiskinan, seperti membentuk keluarga dengan orang tua tunggal. Perspektif ini memberikan penekanan yang kuat pada tanggung jawab dan pilihan individu dalam menentukan status ekonomi seseorang. Perspektif ini lebih cenderung menghubungkan kemiskinan dengan perilaku dan Keputusan individu, dari pada faktor sistematik atau structural. Namun, Teori Neoklasis memperluas pemahaman tentang kemiskinan melebihi pilihan dan perilaku individu. Sudut pandang ini mengakui bahwa kemiskinan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali individu, seperti kurangnya asset social dan pribadi, kegagalan pasar yang mngesampingkan Masyarakat miskin dari pasar kredit, dan Keputusan yang rasional yang diambil dalam situasi yang tidak

menguntungkan. Perspektif ini juga mengakui hambatan-hambatan seperti Pendidikan yang terhambat, status imigran, Kesehatan yang buruk, usia lanjut, dan kesulitan pekerjaan bagi keluarga dengan orang tua Tunggal sebagai faktor-faktor penyebab kemiskinan. Ekonomi neoklasik juga menekankan peran pasar dan pengambilan keputusan yang rasional dalam membentuk hasil ekonomi. Kedua perspektif ini menawarkan wawasan yang berharga tentang masalah kemiskinan yang kompleks, dengan perspektif klasik yang lebih berfokus pada agensi dan tanggung jawab individu, sementara perspektif neoklasik mempertimbangkan berbagai faktor sistemik dan struktural yang lebih luas yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi, materi, dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, yang diukur dengan Tingkat pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, yang diukur dengan Tingkat pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, digunakan dua garis kemiskinan: garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan (BPS, 2016).

### **Tingkat Pengangguran**

Menurut Mankiw (2003), salah satu faktor penyebab pengangguran adalah daya upah, yang mengacu pada ketidakmampuan upah untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan tenaga kerja secara seimbang. Salah satu penyebab daya upah adalah adanya undang-undang kebijakan upah minimum. Dalam Teori Keynesian, pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja dipasar. Keynesian percaya bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis dan dapat mengalami kelebihan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Faktor-faktor seperti kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian atau ketidakefisienan pasar tenaga kerja dapat menyebabkan pengangguran (Meiriza *et al.*, 2024)

Menurut Sukirno (2006) mengatakan bahwa pengangguran dapat mengakibatkan penurunan Masyarakat, yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kesejahteraan dan menghadirkan tantangan kemiskinan. Pertumbuhan pesat angkatan kerja akan meningkatkan tuntutan terhadap ekonomi dalam hal menciptakan dan memperluas peluang kerja, maka Sebagian dari mereka akan bergabung dengan barisan ppengangguran yang sudah ada. Dengan kata lain, pengangguran akan menurunkan pendapatan dan kemakmuran Masyarakat, serta memicu peningkatan kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan cepat Angkatan kerja dapat memperburuk situasi pengangguran jika tidak diimbangi oleh jumlah lapangan kerja yang memadai.

### **Rata-rata lama sekolah**

Menurut Becker, G. S. (1964) mengenai teori modal manusia yang dijelaskan dalam bukunya Human Capital yang dikembangkan Pendidikan memegang peran kunci dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Individu yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak, serta dapat menghindari dari kemiskinan, dan mengalokasikan investasi pada Pendidikan individu akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi Kemakmuran ekonomi suatu negara dalam jangka Panjang. Pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat Pendidikan dalam masyarakat, dan becker berpendapat bahwa peningkatan rata-rata tahun sekolah dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi suatu negara.

### Upah Minimum

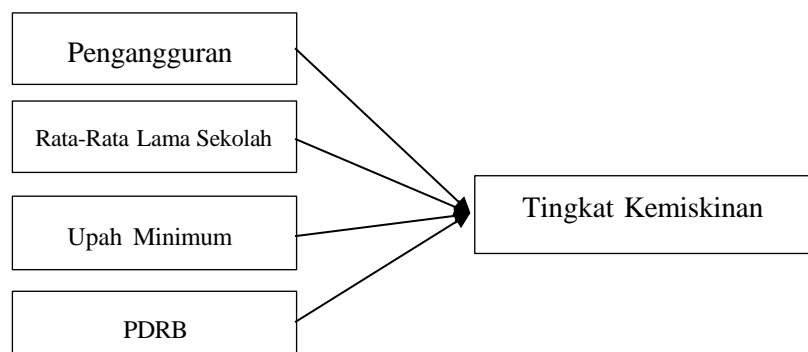
Pandangan Becker, G. S. (1962) mengenai Teori penawaran tenaga kerja menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan terkait partisipasi mereka dalam pasar kerja, dan menetapkan tingkat upah yang mereka harapkan diperoleh. Teori biaya peluang dalam pengambilan keputusan individu terkait partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Menurut teori ini, individu mempertimbangkan manfaat dan biaya peluang dari bekerja ketika mereka membuat keputusan apakah akan bekerja atau tidak.

Manfaat dari pekerjaan mencakup upah yang diterima dan manfaat non-moneter seperti kepuasan pekerjaan, pembelajaran, dan pengalaman. Disisi lain, biaya peluang meliputi waktu yang dihabiskan untuk bekerja yang dapat digunakan untuk aktivitas lain, biaya transportasi, biaya perawatan anak atau anggota keluarga, dan biaya lainnya terkait pekerjaan. Jika manfaat dari pekerjaan tersebut lebih besar dari biaya peluang yang harus diberikan untuk bekerja, lalu individu akan memilih untuk bekerja. Namun, jika biaya peluang melebihi manfaat dari pekerjaan tersebut, individu mungkin memilih untuk tidak bekerja untuk mencari pilihan pekerjaan yang lebih menguntungkan.

### Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDRB) dikemukakan oleh Simon Kuznets, S. (1934) menguraikan konsep dasar PDRB dan metode perhitungannya, menekankan pentingnya pengukuran ekonomi nasional untuk memahami tingkat produksi dan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Kuznets juga menyoroti bahwa PDRB harus mencakup segala aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam suatu wilayah atau negara, termasuk produksi barang dan jasa, serta perubahan dalam stok persediaan. Sutopo (2015) menjelaskan bahwa PDRB merupakan pada total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, mencakup semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Dia juga membahas tentang bagaimana PDRB digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi di suatu daerah, dan merancang kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional. Dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi regional, Sutopo memaparkan Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah meliputi investasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan



### Hipotesis

#### Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Penelitian yang dilakukan oleh Roselina dan Maimunah (2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari Tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di provinsi Lampung selama periode 2017-2021. Pengangguran berdampak negatif, bagi

Masyarakat, dimaa tingginya Tingkat pengangguran merugikan kesejahteraan Masyarakat dan prospek Pembangunan ekonomi jangka Panjang. Penurunan kesejahteraan Masyarakat akibat pengangguran akan meningkatkan kemiskinan karena ketiadaan pendapatan.

**H1: Tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan**

### **Pengaruh Rata-rata lama sekolah Terhadap Kemiskinan**

Penduduk yang diperhitungkan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah mereka yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan Tingkat Pendidikan dalam suatu Masyarakat. Tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah total tahun Pendidikan formal yang telah ditempuh (Miftaah Nur Faritz, 2020).

Penelitian oleh Fauzan Nizar dan Muhammad Arif (2023) diperkirakan peningkatan rata-rata lama sekolah dapat menurunkan Tingkat kemiskinan di Nisa Tenggara Barat, karena memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan teori Human Capital yang menyatakan bahwa investasi dalam Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas Masyarakat. Dengan kata lain, jika kualitas pendidikan meningkat, maka kemungkinan kualitas masyarakat juga akan meningkat. Pendidikan dianggap sebagai faktor yang memungkinkan seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, pendidikan membuka peluang untuk mendapatkan pekerja yang lebih berkualitas dan berprestasi lebih tinggi.

**H2: Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan**

### **Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan**

Teori tenaga kerja menggambarkan bagaimana individu memutuskan untuk masuk ke pasar tenaga kerja dan menentukan Tingkat upah yang mereka harapkan. Penelitian menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak negatif, terhadap kemiskinan di Indonesia jika peningkatan upah minimum tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas atay pertumbuhan ekonomi yang seimbang, hal itu juga dapat menyebabkan kenaikan upah minimum tidak memiliki dampak negatif signifikan terhadap kemiskinan (Putri & Putri, 2021)

**H3: Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan**

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan**

PDRB adalah nilai keseluruhan dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB mencakup nilai tambah dari berbagai sektor seperti pertanian, industry, perdagangan dan sektor lainnya yang berkontribusi pada perekonomian wilya tersebut (Damanik & Sidauruk, 2020).

Berdasarkan penelitian yang disebutkan bahwa PDRB berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan Masyarakat, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan, sehingga Tingkat kemiskinan dapat berkurang. Selain itu, Penigkatan PDRB juga dapat mendorong investasi dan konsumsi Masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi Tingkat kemiskinan (Dama *et al.*, 2016).

**H4: PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan**



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *cross section* dengan objek penelitian adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2021.

### **Sumber Data**

Penelitian ini diambil dari website/situs resmi BPS dan NSWI Jawa Timur tahun 2021.

### **Definisi Operasional Masing-Masing Variabel**

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kemiskinan sebagai variabel dependen. Sementara itu, variabel independen yang diuji meliputi tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB.

#### **1. Kemiskinan**

Data kemiskinan mencakup jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2021 yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

#### **2. Tingkat Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang menganggur dalam suatu wilayah. Di Jawa Timur, tingkat pengangguran pada tahun 2021 dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan data TPT di 38 kabupaten/kota, dan dinyatakan dalam satuan persen.

#### **3. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah di Jawa Timur pada tahun 2021 dihitung berdasarkan data dari 38 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase untuk memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur secara keseluruhan.

#### **4. Upah Minimum**

Upah minimum adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerja. Di Jawa Timur, upah minimum ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota pada tahun 2021 dan jumlahnya dinyatakan dalam satuan rupiah.

#### **5. PDRB**

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur pada tahun 2021 dihitung dengan menjumlahkan nilai PDRB di masing-masing 38 kabupaten/kota, yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

## **TEKNIK ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan data *cross section* dari 38 kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2021. Uji yang

dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan uji normalitas dan uji asumsi klasik, termasuk uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas untuk memastikan ketepatan model yang digunakan.

Model dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$\ln Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} - \beta_2 X_{2i} - \beta_3 \ln X_{3i} - \beta_4 \ln X_{4i} + e_i$$

Ket:

Y	= Kemiskinan
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien Regresi
X1	= Pengangguran
X2	= Rata-Rata Lama Sekolah
X3	= Upah Minimum
X4	= PDRB
e	= <i>Error Term</i>
i	= Kota/Kabupaten di Jawa Timur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif penelitian ini meliputi nilai-nilai sebagai berikut: nilai minimum (Min), nilai maksimum (Max), mean (M), standar deviasi (SD). Berikut merupakan hasil dari analisis deskriptif:

**Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif**

Ket	Kemiskinan	Tingkat Pengangguran	Rata-Rata Lama Sekolah	Upah Minimum	PDRB
Rata-Rata	4.44809	5.519737	8.06079	14.68558	10.51819
Standar Deviasi	1.026697	2.010156	1.576578	0.26990819	0.9866676
Minimum	2.124654	2.04	4.86	14.47733	8.8444423
Maksimum	5.6225	10.87	11.37	15.27424	13.28826

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

### Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:

**Tabel 8. Hasil Uji Normalitas**

<u>Variabel</u>	<u>Prob&gt;z</u>
resid	0.05741

Sumber: Hasil output stata, 2024

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa nilai probability sebesar  $0,05741 > 0,05$  maka, data tersebut berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	VIF	1/VIF
Tingkat Pengangguran	2.94	0.340648
Rata-Rata Lama Sekolah	2.30	0.434102
Upah Minimum	2.45	0.408994
PDRB	1.90	0.526735
Mean VIF	2.40	

*Sumber: Hasil output stata, 2024*

Hasil uji pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai VIF variabel tingkat pengangguran sebesar  $2.94 < 10$ , variabel rata-rata lama sekolah sebesar  $2.30 < 10$ , variabel upah minimum sebesar  $2.45 < 10$ , dan variabel PDRB  $1.90 < 10$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

estat hettest	
chi2 (1)	0.85
Prob > chi2	0.3561

*Sumber: Hasil output stata, 2024*

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai probability variabel sebesar  $0.3561 > 0,05$  maka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Y	Koefisien	Standar Deviasi	t	P> t	[95% Confidence Interval]
Tingkat Pengangguran	0.12595	0.0631168	0.20	0.843	-0.1158171 0.141007
Rata-Rata Lama Sekolah	-0.5010807	0.071288	-7.03	0.000	-0.6461172 -0.3560442
Upah Minimum	0.0579349	0.4303132	0.13	0.894	-0.8175439 0.9334136
PDRB	0.6214307	0.1034096	6.01	0.000	0.4110423 0.8318191
Konstanta	1.030542	5.60579	0.18	0.855	-10.37452 12.43561

*Sumber: Hasil output stata, 2024*

Hasil persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:  
 $\ln Y = 1.030542 + 0.12595x_1 - 0.5010807x_2 + 0.0579349\ln x_3 + 0.6214307\ln x_4 + e$

## Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Observasi	=	38
F (4, 33)	=	39.81
Prob > F	=	0.0000
$R^2$	=	0.8283
Adj- $R^2$	=	0.8075
<u>Root MSE</u>	<u>=</u>	<u>0.45043</u>

*Sumber: Hasil output stata, 2024*

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai Adj- $R^2$  sebesar 0.8075 atau 80.75 persen. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 80.75 persen, sedangkan sisanya yaitu 19.25 persen dijelaskan oleh variabel lain.

### Hasil Uji F

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 39.81 > nilai F tabel yaitu 2.66 dan nilai sig yaitu  $0.0000 \leq 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

### Hasil Uji t

Hasil uji di 38 kabupaten/kota Jawa timur tahun 2021 menggunakan data *cross section* dengan penjelasan hasil uji t sebagai berikut:

#### Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki nilai t hitung sebesar 0.20 dan nilai p value sebesar 0.843 lebih besar dari taraf signifikan 0.05 artinya secara parsial tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, ditolak. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ristika *et al*, 2021) yang menyatakan bahwa bahwa orang yang menganggur tidak selalu berada dalam kondisi miskin, dan ada kemungkinan bahwa beberapa di antara mereka masih didukung secara finansial oleh anggota keluarga atau memiliki sumber pendapatan lainnya. Selain itu, fluktuasi dalam perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur juga berkontribusi pada pengaruh yang relatif kecil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Variabilitas ini menghasilkan temuan bahwa jumlah penduduk yang terpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi tidak begitu nyata atau memberikan dampak yang terbatas.

#### Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah menghasilkan nilai t hitung sebesar -7.03 dan nilai p value sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 artinya bahwa secara parsial terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara rata-rata

lama sekolah dan kemiskinan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, diterima.

### **Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah menghasilkan nilai t hitung sebesar 0.13 dan nilai p value sebesar 0.894 lebih besar dari taraf signifikan 0.05 artinya bahwa secara parsial tidak terdapat hubungan yang signifikan antara upah minimum dan kemiskinan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, ditolak. Hal ini diperkuat dengan teori bahwa dalam kemiskinan Jawa Timur tahun 2021 upah minimum positif t tidak signifikan. Upah minimum berpengaruh relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan Jawa Timur dimana hal ini dapat disebabkan oleh faktor distribusi pendapatan yang tidak merata karena tidak semua perusahaan/UMKM menerapkan membayar pekerja dengan upah minimum 38 kota/kabupaten Jawa Timur dan faktor lain-lain, yang artinya peningkatan upah minimum belum tentu menurunkan tingkat kemiskinan.

### **Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan**

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel PDRB menghasilkan nilai t hitung sebesar 6.01 dan nilai p value sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikan 0.05 artinya bahwa secara parsial terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara PDRB dan kemiskinan. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 PDRB di Jawa Timur mengalami peningkatan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan menjadi bangkrut, sehingga kemiskinan meningkat dan hal tersebut berlaku secara menyeluruh di semua provinsi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil  $R^2$  menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 80,75 persen, sedangkan sisanya yaitu 19.25 persen dijelaskan oleh variabel lain.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa:
  - a) Tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
  - b) Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
  - c) Upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
  - d) PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–19.
- 1Badan Pusat Statistik. (2016). Kemiskinan. Diambil kembali dari [bps.go.id: https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/1378/profil-kemiskinan-diindonesia-september-2016.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/01/03/1378/profil-kemiskinan-diindonesia-september-2016.html).

- Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 10,59 persen. [BPS Provinsi Jawa Timur](#)
- Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of political economy*, 70(5, Part 2),
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. National Bureau of Economic Research.
- Dama, H. Y., Lapian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>.
- Davis, E. P., & Sanchez- Martinez, M. (2015). *Economic Theories of poverty*. Joseph Rowntree Foundation.
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1).
- Kuznets, S. (1934). *National Income: A Summary of Findings*. National Bureau of Economic Research.
- Lantik, A., Hartiwingsih, & Ayu, I. gusti. (2018). Efektivitas peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 11(1).
- Mankiw, N. Gregory. 2003, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kelima, Alih Bahasa. Imam Nurmawan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Meiriza, M. S., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., & Saragi, S. L. (2024). *Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern*. 4.
- Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Erlangga 2010).
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2).
- Roseline, F. C., & Maimunah, E. (2022). Analisis Pengaruh Pdrb Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Cakrawala Repositori IMW*.
- Sadono Sukirno. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, B. (2015). *Pengantar Ekonomi Regional: Suatu Pendekatan Analisis Ekonomi Regional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2). <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Yanthi, C. I. D. P., & Marhaeni, A. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 11(2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/download/23280/15301>